

**ANALISIS EFISIENSI BELANJA DAERAH  
DI KABUPATEN BLITAR JAWA TIMUR TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus pada Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun Oleh:**

**Risqi Noor Hidayati Putri**

**105020100111048**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2014**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul:

**ANALISIS EFISIENSI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BLITAR JAWA  
TIMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus pada Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur)**

Yang disusun oleh:

Nama : Risqi Noor Hidayati Putri

NIM : 105020100111048


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi*  
yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Agustus 2014.

Malang, 25 Agustus 2014

Dosen pembimbing,



**Dr. Susilo, SE., MS**

**NIP. 19601030 198601 1 001**

# **ANALISIS EFISIENSI BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BLITAR JAWA TIMUR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

**(Studi Kasus pada Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur)**

**Risqi Noor Hidayati Putri, Dr.Susilo, SE., MS**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : risqinoorhp@yahoo.com

## **ABSTRACT**

Spending efficiency is an important issue in the public sector policy, expenditure which efficient is believed can encourage an increase in the welfare. The purpose of this study is to analyze the efficiency of public spending in Blitar Regency to the welfare of society, especially education, health and infrastructure spending. This study uses the data on period 2004-2012 and uses Data Envelopment Analysis and Linear Regression. Input variables used are education, health and infrastructure spending. Output variables for education using the number of schools, number of teachers and number of students, for health use a number of puskesmas (health centers), the number of health workers and number of immunization and for infrastructure use good road length and extensive water service. And to see the effect efficiency of the regional spending on the welfare of society is to use the human development index (HDI).

Based on calculations by the DEA found that the efficiency score on average in the nine year have not been efficient. However, education, health and infrastructure have a different effect on the welfare of the society through the human development index. The results showed that the efficiency in education and health are significant and negative effect on the HDI. While, the efficiency of the infrastructure are not significant and negative effect on the HDI

**Keyword** : Efficiency, public spending, HDI, data envelopment analysis, linear regression

---

## **A. LATAR BELAKANG**

Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah dan sistem desentralisasi adalah agar pembangunan di daerah berjalan seiring dengan pembangunan pusat. Otonomi daerah dan sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Implementasinya, sejak diterapkannya sistem desentralisasi fiskal, pos pendapatan daerah mengalami kenaikan. Sebelum pelaksanaan sistem desentralisasi, pemerintah pusat menyalurkan dana ke daerah dalam bentuk dana hibah yang penggunaannya telah ditentukan. Setelah pelaksanaan sistem desentralisasi pada tahun 2001, pemerintah pusat mengalihkan dana untuk mengurangi kesenjangan fiskal yaitu melalui dana perimbangan. Dengan adanya dana perimbangan tersebut, maka urusan pemerintah dalam pengeluaran per sektor misalnya dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sektor lainnya lebih terkonsentrasi pada daerah. Besarnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik melalui pengeluaran belanja tampak dari alokasi pengeluaran belanja pemerintah daerah. Suatu belanja dikatakan efisien apabila input yang tersedia mampu menghasilkan output berupa barang atau jasa pada tingkat yang paling optimal bagi kepentingan masyarakat. Berdasarkan data pengeluaran pemerintah daerah berdasarkan sektor pada tahun 2004 oleh Bank Dunia diketahui bahwa sebagian besar pengeluaran pemerintah telah terpusat pada kabupaten/kota dibandingkan pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Pengeluaran pemerintah atas pendidikan menduduki peringkat pertama yaitu sebesar 33%, kemudian diikuti oleh sektor aparatur pemerintah dan sektor pengawasan sebesar 30%. Sektor

infrastruktur pengeluarannya mencapai 14 % dan di sektor kesehatan adalah 7% dari total pengeluaran. Sedangkan berdasarkan data alokasi belanja daerah Jawa Timur pada tahun 2006-2010 oleh Bank Dunia diketahui bahwa sebagian besar belanja pemerintah kabupaten/kota berdasarkan klasifikasi ekonomi dialokasikan untuk belanja pegawai dimana belanja pegawai pemerintah kabupaten/kota mengalami peningkatan dari 48 persen pada tahun 2006 menjadi 56 persen pada tahun 2010. Sedangkan alokasi belanja berdasarkan sektor, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja daerahnya sebagian besar untuk sektor pendidikan dimana porsi belanja ini mengalami peningkatan dari 33 persen (Rp. 8,6 trilyun) pada tahun 2006 menjadi 41 persen (Rp. 15,7 trilyun) pada tahun 2010. Hal ini juga terjadi pada belanja daerah Kabupaten Blitar dimana sampai dengan tahun 2010 peningkatannya cukup signifikan. Pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 alokasi anggaran yang digunakan untuk bidang pendidikan di Kabupaten Blitar mengalami kenaikan secara signifikan. Meskipun demikian, perkembangan pengeluaran sektor kesehatan dan infrastruktur dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Disisi lain, dengan adanya input anggaran yang cukup tinggi, seharusnya juga diikuti dengan perkembangan yang baik pada sektor-sektor terkait. Fenomena yang ada adalah ketika anggaran pemerintah semakin besar, proses pembangunan tidak berjalan mengikuti anggaran yang tersedia. Perkembangan indikator sosial ekonomi di Kabupaten Blitar seperti jumlah kemiskinan, indeks pembangunan manusia, angka buta huruf (ABH), angka partisipasi sekolah (APS), angka kelahiran bayi (AKB), angka harapan hidup (AHH) dan indikator lainnya berkembang cukup baik meskipun berfluktuatif dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat tidak praktis menunjukkan kesuksesan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Pengeluaran atau belanja pemerintah yang selalu meningkat setiap tahunnya belum tentu diikuti dengan penggunaan pengeluaran yang semakin efisien. Efisiensi disini diartikan sebagai suatu usaha untuk mengoptimalkan pengeluaran sektor publik dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan pentingnya efisiensi belanja, ada beberapa jenis belanja yang penting untuk dilakukan seefisien mungkin karena efisiensi belanja pemerintah berdampak pada pelayanan publik, diantaranya yang paling penting yakni belanja di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dianggap sebagai pelayanan dasar yang harus diterima oleh masyarakat secara memadai. Peran pemerintah daerah melalui APBD, khususnya belanja daerah menjadi penting dengan tujuan efisiensi pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya mempunyai *multiplier effect* terhadap kesejahteraan masyarakat. Atas dasar beberapa pemikiran dan pertimbangan di atas, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten Blitar, khususnya anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur telah dikelola secara efisien dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### **Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah sebagai pengguna uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melaksanakan serta mencapai kesejahteraan (Prasetya, 2012). Menurut Mangkoesobroto (2010), teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu teori makro dan teori mikro. Teori makro mengenai pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan menjadi 3 kelompok yakni Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah, Teori Adolf Wagner dan Teori Peacock dan Wiseman. Sedangkan untuk teori secara mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja.

## **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

APBD pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Belanja menurut kelompok belanja dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Jenis belanja langsung dapat diukur dengan hasil dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut. Jenis belanja tidak langsung dapat diukur dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Dalam Permendagri No.59 Tahun 2007, belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No.59 Tahun 2007 terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

## **Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur**

Banyak negara yang percaya bahwa pengeluaran sektor publik mampu berkontribusi terhadap proses pembangunan ekonomi. Sektor-sektor yang dirasa strategis, misalnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur biasanya memiliki alokasi anggaran yang cukup besar mengingat perannya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi didasari oleh *investment in human capital*. Dalam teori *human capital*, asumsi yang digunakan adalah bahwa pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat atau sumber daya manusia yang memiliki produktifitas. Begitu juga yang terjadi pada bidang kesehatan yang perannya tidak kalah penting bagi peningkatan kualitas daya sumber manusia. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Sektor infrastruktur juga merupakan sektor yang penting selain pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur merupakan wujud sarana dan prasarana fisik yang dapat mendukung produktivitas ekonomi dan pembangunan sehingga berjalan dengan lebih lancar. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi.

## **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Kualitas pemerintahan suatu negara secara makro dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini memiliki skor 0-1, dimana angka 0 mencerminkan kualitas SDM terendah, sementara angka 1 mencerminkan kualitas SDM tertinggi. Untuk sektor pendidikan, salah satu komponen indeks pembentuk IPM adalah Indeks Pendidikan (IP) yang merefleksikan kualitas pendidikan suatu negara yang terlihat pada angka buta huruf, tingkat partisipasi sekolah dan lamanya sekolah. Kesehatan juga merupakan kebutuhan publik yang selayaknya juga harus disediakan oleh setiap negara. Tidak berbeda dengan pendidikan, tingkat kesehatan setiap warga negara juga berpengaruh terhadap produktivitas negara. Jika dikaitkan dengan kualitas pemerintahan, salah satu komponen indeks pembentuk IPM adalah Indeks Kesehatan (IHH) yang merefleksikan kualitas kesehatan masyarakat yang tercermin dalam indikator panjang umur dan usia harapan hidup. Sektor infrastruktur juga merupakan sektor yang penting selain pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur merupakan wujud sarana dan prasarana fisik yang dapat mendukung produktivitas ekonomi dan pembangunan sehingga berjalan dengan lebih lancar.

## Makna dan Konsep: Efisiensi dan Efektivitas

Efisiensi merupakan rasio yang membandingkan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan dilakukan secara efisien apabila suatu target kinerja tertentu (*outcome*) dapat dicapai dengan menggunakan sumberdaya dan biaya serendah-rendahnya. Dasar efisiensi adalah rasio/perbandingan output terhadap input. Cara untuk meningkatkan efisiensi menurut Yasar A. Ozcan (dalam Budi, 2010) antara lain:

- a. Meningkatkan output
- b. Mengurangi input
- c. Jika kedua output dan input ditingkatkan, maka tingkat kenaikan untuk output harus lebih besar daripada tingkat kenaikan untuk input
- d. Jika kedua output dan input diturunkan, laju penurunan untuk output harus lebih rendah daripada tingkat penurunan untuk input

Dalam dimensi efektivitas, kita diajak melihat bahwa segala pendanaan yang dianggarkan dalam APBD harus wajar secara nominal dan bisa maksimal dari sisi pemanfaatan (nilai kegunaan). Efektivitas berbeda dengan efisiensi. Efisiensi adalah pengorbanan untuk mencapai tujuan. Dimana semakin kecil pengorbanannya dalam mencapai tujuan, maka dikatakan semakin efisien. Sedangkan Efektivitas adalah ukuran sejauh mana tujuan (organisasi) dapat dicapai (Sigit, 2003).

Efektivitas merupakan ukuran yang tepat dalam melihat manfaat yang dinikmati masyarakat sesuai dengan input yang dikeluarkan pemerintah. Jika efisiensi melihat hubungan antara input dan output, maka efektivitas melihat hubungan antara input dan tujuan atau sasaran. Cara mengetahui tercapainya efektivitas bisa melalui tujuan pemerintah seperti meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran dan lain sebagainya. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas, maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Hidayat (dalam Kesuma, 2013) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

## Data Envelopment Analysis (DEA)

Menurut Purwantoro (2006), DEA merupakan suatu teknik pemrograman matematis yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi relatif dari sebuah kumpulan unit-unit pembuat keputusan (DMU) dalam mengelola sumberdaya (input) sehingga menjadi hasil (output) dimana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui. DEA menggunakan teknis program matematis yang dapat menangani variabel dengan batasan yang banyak dan tidak membatasi input dan output yang akan dipilih karena teknis yang dipakai dapat mengatasinya.

DEA biasanya digunakan untuk mengukur efisiensi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, organisasi non profit maupun BUMN. Unit individual yang dianalisa disimbolkan sebagai DMU (*Decision Making Unit*) atau Unit Pengambil Keputusan. Dalam mengoperasikan DEA, perlu diperhatikan konsep-konsep dasar yang harus dipenuhi, antara lain: (Purwantoro, 2006)

1. *Positivity*, artinya DEA mensyaratkan semua variabel input dan output bernilai positif ( $>0$ )
2. *Isotonicity*, artinya input dan outputnya harus mempunyai hubungan yang isotonis, yaitu untuk setiap kenaikan/pertambahan jumlah input harus menghasilkan kenaikan setidaknya satu variabel output dan tidak ada variabel output yang mengalami penurunan
3. Jumlah DMU adalah tiga kali jumlah variabel input dan outputnya, untuk memastikan adanya *degrees of freedom*
4. *Homogeneity*, artinya DEA menuntut seluruh DMU memiliki variabel input dan output yang sama jenisnya

## Regresi Linear (*time series*)

Analisis regresi linier menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel X (variabel eksogen) yang merupakan penyebab dari variabel Y (variabel endogen) yang merupakan akibat. Regresi linier tidak hanya melihat keterkaitan antar variabel-variabel namun juga mengukur

besarnya hubungan kausalitasnya. Ketepatan fungsi regresi untuk pengujian hipotesis dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *uji signifikansi*. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model tersebut dianggap relevan atau tidak. Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji heteroskedastitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.

### C. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan jenis data *time series* yaitu dengan metode pengumpulan data menggunakan data Kabupaten Blitar pada tahun 2004 sampai dengan 2012. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan kepustakaan. Sesuai tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini menggunakan alat analisis *Data Envelopment Analysis* (DEA) dan Regresi Linear (*time series*). DEA digunakan untuk menghitung efisiensi penggunaan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap output yang dihasilkan. Sedangkan regresi linear digunakan untuk mengetahui pengaruh antara pengeluaran sektor publik terhadap indeks pembangunan manusia. Dalam DEA, efisiensi relatif UKE didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbangnya (*total weighted output/ total weighted input*). Inti dari DEA adalah untuk menentukan bobot untuk setiap input dan output UKE. Bobot tersebut memiliki sifat: (1) tidak bernilai negatif, dan (2) bersifat universal, artinya setiap UKE dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya (*total weighted output/ total weighted input <1*) (Pertwi, 2007)

Secara teknis, unit ekonomi model DEA diformulasikan dari persamaan fraksional yang menggunakan unit input dan output sebagai variabel keputusan. Misalkan ada  $n$  unit akan dibandingkan. Setiap unit menggunakan  $m$  input dan menghasilkan  $s$  output, di mana  $Y_{sj} > 0$  dan  $X_{mj} > 0$ .  $Y_{sj}$  adalah output  $s$  yang diproduksi oleh  $j$  unit, sementara  $X_{mj}$  mewakili input  $m$  yang digunakan oleh unit  $j$ .  $v_i$  adalah bobot input ( $i = 1, 2, \dots, m$ ) dan  $u_r$  adalah bobot output ( $r = 1, 2, \dots, s$ ).

Setiap unit ekonomi akan memiliki satu formulasi persamaan fraksional. Fungsi tujuan dari persamaan fraksional untuk unit  $o$  dapat digambarkan sebagai berikut (Cooper et all, (2000)):

$$(FP_o) \max \theta = \frac{u_1 y_{1o} + u_2 y_{2o} + \dots + u_s y_{so}}{v x_o} \quad (1)$$

Kendala

$$\frac{u_1 y_{ij} + \dots + u_s y_{sj}}{v x_j} \leq 1 \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

$$v_1 \geq 0 \quad (3)$$

$$u_1, u_2, \dots, u_m \geq 0 \quad (4)$$

Kemudian pada tahap selanjutnya, persamaan fraksional akan diubah menjadi persamaan linier (LP<sub>o</sub>) melalui metode simpleks untuk menemukan solusi optimal untuk fungsi tujuan. Secara umum, Cooper et all. (2000) persamaan linier (LP<sub>o</sub>) ditentukan sebagai berikut : Saputra (2011)

$$(LP_o) \max \theta = u_1 y_{1o} + \dots + u_s y_{so} \quad (5)$$

Kendala

$$v x_o = 1 \quad (6)$$

$$u_1 y_{1j} + \dots + u_s y_{sj} \leq v x_j \quad (7)$$

$$(j = 1, 2, \dots, n)$$

$$v \geq 0 \quad (8)$$

$$u_1, u_2, \dots, u_m \geq 0 \quad (9)$$

Model ini mengacu pada Charnes, Cooper dan Rhodes (CCR) Model yang menggunakan asumsi CRTS. Mengikuti ide Farrel dalam orientasi ukuran, penelitian ini akan menggunakan orientasi output dimana fokusnya adalah konsisten hanya pada gerakan maksimal proporsional dari unit ekonomi dalam menambah output dengan himpunan input (Coelli, 1996, dalam Saputra 2011).

Regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Adapun dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan model analisis regresi linier secara *time series*. *Ordinary Least Square* (OLS) merupakan salah satu metode yang sering digunakan karena kemudahannya dalam mengolah data. Analisis regresi linier menunjukkan hubungan sebab akibat antara variabel X (variabel eksogen) yang merupakan penyebab dari variabel Y (variabel endogen) yang merupakan akibat. Regresi linier ini tidak hanya melihat keterkaitan antar variabel-variabel namun juga mengukur besarnya hubungan kausalitasnya. Berikut ini model umum dari analisis regresi linier Gujarati,1993):

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_n X_{ni} + \varepsilon_i$$

Dimana :

- Y : Variabel endogen atau variabel tak bebas
- i : Periode
- $\beta_0$  : Intersep atau nilai Y saat X = 0
- X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>n</sub> : Variabel eksogen atau variabel bebas
- $\beta_1, \beta_2, \beta_n$  : Parameter dari X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>n</sub>
- $\varepsilon_i$  : *Error term* atau derajat kesalahan

#### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Hasil Perhitungan Efisiensi Menggunakan Metode DEA

Nilai efisiensi dari belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) dengan menggunakan *Software Banxia Frontier Analyst*. Berikut ini merupakan nilai efisiensi dari belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Kabupaten Blitar tahun 2004 sampai dengan 2012.

Tabel 4.1 : Nilai Efisiensi Belanja Pendidikan Kabupaten Blitar Tahun 2004- 2012

Tahun	Skor (%)	Hasil
2004	100	Efisien
2005	100	Efisien
2006	86,3	Tidak Efisien
2007	68,5	Tidak Efisien
2008	55,7	Tidak Efisien
2009	56,9	Tidak Efisien
2010	45,2	Tidak Efisien
2011	42,2	Tidak Efisien
2012	35,4	Tidak Efisien

Sumber: hasil olahan,2014

Berdasarkan tabel 4.1 diatas di Kabupaten Blitar hanya pada tahun 2004 dan 2005 terjadi tingkat efisiensi tertinggi yaitu dengan nilai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengalokasian belanja pendidikan pada tahun 2004 dan 2005 cukup baik dibandingkan dengan dengan tahun 2006 sampai dengan tahun 2012 yang nilai efisiensinya kurang dari 100%.

Tabel 4.2 : Nilai Efisiensi Belanja Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2004 –2012

Tahun	Skor (%)	Hasil
2004	100	Efisien
2005	86,4	Tidak Efisien
2006	59,6	Tidak Efisien
2007	59,7	Tidak Efisien
2008	42,3	Tidak Efisien
2009	41,3	Tidak Efisien



Tahun	Skor (%)	Hasil
2010	33,4	Tidak Efisien
2011	40,5	Tidak Efisien
2012	34,5	Tidak Efisien

Sumber: hasil olahan,2014

Berbeda dengan belanja pada bidang pendidikan, di bidang kesehatan tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2004 yaitu dengan nilai 100%, sedangkan pada tahun 2005 sampai dengan 2012 nilai efisiensinya dibawah 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa belanja bidang kesehatan pada tahun penelitian secara rata-rata adalah belum efisien.

Tabel 4.3 : Nilai Efisiensi Belanja Infrastruktur Kabupaten Blitar Tahun 2004-2012

Tahun	Skor (%)	Hasil
2004	100	Efisien
2005	66,4	Tidak Efisien
2006	100	Efisien
2007	100	Efisien
2008	91,8	Tidak Efisien
2009	75,3	Tidak Efisien
2010	94,6	Tidak Efisien
2011	86,3	Tidak Efisien
2012	72,4	Tidak Efisien

Sumber: hasil olahan,2014

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada tahun 2004, 2006 dan 2007 yaitu mencapai nilai efisiensi 100%. Sedangkan untuk tahun 2005, 2008 sampai dengan 2012 belanja di bidang infrastruktur memiliki tingkat efisiensi dibawah 100% yang berarti masih belum efisien.

Analisis DEA selain dapat memberikan informasi mengenai nilai efisiensi, juga menyediakan informasi mengenai kondisi variabel yang memerlukan perbaikan (*potential improvement*) agar dapat mencapai nilai efisiensi 100%. Potensi perbaikan dinyatakan dalam bentuk persentase sehingga perbaikan yang perlu dilakukan adalah sebesar persentase tersebut. Ketidakefisienan bisa disebabkan karena tidak efisiennya input yang digunakan maupun output yang dihasilkan, sehingga harus ada perbaikan input maupun output dengan cara mengurangi input atau menambah output.

### Meminimumkan Input untuk Meningkatkan Efisiensi

Efisien berarti menghasilkan suatu nilai output yang maksimum dengan sejumlah input tertentu, atau dengan input minimum dapat menghasilkan output tertentu. Agar tingkat efisiensi pada tahun 2004 sampai dengan 2012 meningkat maka penggunaan input pada tahun yang belum efisien di Kabupaten Blitar harus mengacu pada tahun yang telah efisien. Berikut merupakan tingkat perbaikan (*potential improvement*) pada variabel input.

Tabel 4.4 : Potential Improvement Belanja Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Tahun	Belanja Pendidikan	Belanja Kesehatan	Belanja Infrastruktur
2004	0	0	0
2005	0	-13	-35
2006	-13	-40	0
2007	-31	-40	0
2008	-44	-57	-8
2009	-43	-58	-24
2010	-54	-66	-5



Tahun	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa	Jumlah Guru	Tenaga Kesehatan	Puskesmas	Imunisasi	Panjang Jalan yang Baik	Luas Layanan Air
2006	7	5	0	1	1	0	0	0
2007	0	2	0	0	24	9	0	0
2008	0	1	0	0	20	8	0	39
2009	13	14	0	0	17	7	0	44
2010	12	12	0	2	0	2	0	60
2011	10	16	0	0	23	8	0	50
2012	15	18	0	0	29	7	0	43

Sumber: hasil olahan, 2014

Peningkatan efisiensi juga bisa dilakukan dengan cara meningkatkan sejumlah output sebagaimana ditunjukkan pada hasil perbaikan bidang pendidikan dimana perlu adanya perbaikan dengan menambah sekolah dan siswa masing-masing 7% dan 5% pada tahun 2006. Sedangkan pada tahun 2012, perbaikan dari sisi output adalah dengan menambah sekolah dan siswa masing-masing adalah 15% dan 18%. Peningkatan dari sisi output untuk bidang pendidikan, jumlah sekolah dan jumlah siswa masing-masing perlu adanya peningkatan dalam jumlahnya, namun mengingat jumlah siswa dan sekolah terkait dengan jumlah penduduk/masyarakat yang sedang menempuh pendidikan, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa peningkatan ini tidak sesuai dengan jumlah angka partisipasi usia produktif untuk bersekolah. Namun, perbaikan dapat dilakukan dengan cara peningkatan pelayanan terkait program belajar dan penambahan fasilitas pendukung belajar mengajar siswa. Untuk jumlah guru, tidak perlu adanya perbaikan mulai tahun 2004 sampai dengan 2012 sesuai dengan hasil perbaikan, hal ini berarti komposisi jumlah guru sudah cukup baik.

Untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa output dalam tahun penelitian yang harus dilakukan perbaikan dengan meningkatkan jumlah imunisasi dan pelayanan di puskesmas. Untuk jumlah tenaga kesehatan sesuai dengan hasil perbaikan komposisinya sudah cukup baik. Sedangkan untuk bidang infrastruktur, perbaikan harus dilakukan dengan meningkatkan jangkauan luas layanan air sesuai dengan persentase pada *potential improvement* dan peningkatan dari segi kualitas tidak hanya kuantitas seperti bukan dalam hal penambahan jumlah panjang jalan, melainkan meningkatkan jumlah panjang jalan yang baik dengan perbaikan-perbaikan dari segi kualitas.

### **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Penelitian ini berfokus pada permasalahan tata kelola anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam upaya mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat. Hubungan kausal antar variabel ditunjukkan melalui hubungan variabel-variabel pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam rangka mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Berdasarkan pada permasalahan, perhitungan penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan regresi linear runtut waktu (*time series*) yang diolah menggunakan Eviews 7.

### **Pengaruh Tingkat Efisiensi Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Dalam pengaruhnya terhadap IPM, tingkat efisiensi belanja pendidikan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM yaitu dengan nilai probabilitas sebesar 0,0097, artinya terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis "Pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia". Namun, hubungan negatif tersebut menjelaskan bahwa semakin tidak efisien anggaran pendidikan maka akan berdampak pada penurunan IPM, sebaliknya jika semakin efisien anggaran pendidikan maka akan berdampak pada peningkatan IPM. Hal ini disebabkan karena input anggaran yang dipergunakan kurang seimbang dengan peningkatan output bidang pendidikan, penyerapan anggaran yang cenderung menurun di setiap tahun, khususnya anggaran realisasi program kegiatan, porsi belanja masih didominasi oleh belanja tidak

langsung (belanja pegawai) dan jika dilihat dari segi partisipasi siswa sekolah masih perlu ditingkatkan agar APK pendidikan utama yaitu pendidikan menengah semakin tinggi, bahkan bila mungkin justru dapat menarik lulusan dari daerah lain untuk bersekolah di Kabupaten Blitar karena lebih baiknya mutu pendidikan yang diberikan.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, suatu belanja dikatakan efisien apabila input yang tersedia mampu menghasilkan output berupa barang atau jasa pada tingkat yang paling optimal untuk kepentingan masyarakat. Kenyataannya, efisiensi yang cenderung menurun dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir mengindikasikan bahwa belum terjadi keseimbangan antara penggunaan input untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang semakin mahal dengan output yang dihasilkan yang fluktuatif dimana terjadi kenaikan/penurunan dan cenderung tetap. Jika hal ini terjadi secara terus menerus, maka semakin besarnya alokasi anggaran bidang pendidikan tidak akan berpengaruh pada tingkat perbaikan kualitas sumber daya manusia (IPM) di daerah tersebut. Padahal menurut teori *human capital*, pendidikan formal merupakan faktor yang dominan untuk menghasilkan masyarakat atau sumber daya manusia yang memiliki produktivitas.

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode DEA, tingkat efisiensi belanja bidang pendidikan pada tahun 2004-2012 secara rata-rata masih belum efisien dikarenakan tingkat efisiensi yang mencapai 100% hanya pada tahun 2004 dan 2005, sedangkan tahun 2006-2012 masih dibawah 100%. Hal ini memiliki dampak hubungan terhadap IPM yang berpengaruh negatif. Dengan demikian, perbaikan bidang pendidikan selayaknya diarahkan untuk peningkatan output seperti pembangunan gedung sekolah dan peningkatan kualitas penunjang kegiatan belajar mengajar atau melalui penurunan input dengan pengalokasian anggaran yang lebih terarah dan mengutamakan prioritas dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Verhoeven et.all (2007) dan Jafarov (2008) menunjukkan bahwa pada daerah yang diteliti, belanja yang digunakan juga masih belum efisien, artinya belanja pemerintah dinilai belum dialokasikan secara tepat.

Dengan anggaran pendidikan yang relatif besar sedapat mungkin diperuntukkan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti penambahan gedung sekolah. Hal ini sejalan dengan tingkat perbaikan (*potential improvement*) yang menunjukkan bahwa bidang pendidikan secara keseluruhan harus memperbaiki tingkat efisiensinya dengan menurunkan input dan meningkatkan output sebagaimana telah dipaparkan dalam *overall potential improvement*. Selain itu, tugas pemerintah daerah adalah melakukan pemerataan pendidikan untuk masyarakat.

### **Pengaruh Tingkat Efisiensi Belanja Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Tingkat efisiensi belanja kesehatan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap IPM dengan nilai probabilitas sebesar 0,0007, artinya terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis "Kesehatan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia". Namun, koefisien regresi tingkat efisiensi belanja kesehatan yang negatif menunjukkan bahwa semakin tidak efisien anggaran kesehatan akan berdampak pada penurunan IPM, sebaliknya jika semakin efisien anggaran kesehatan maka akan berdampak pada peningkatan IPM. Ketika tingkat efisiensi bidang kesehatan mengalami peningkatan, maka IPM akan meningkat. Hal ini berarti, ketika output kesehatan yang dihasilkan rendah ataupun anggaran yang disalurkan untuk program bantuan kesehatan menurun, maka akses masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan semakin sulit karena akses layanan kesehatan akan menjadi mahal. Sebaliknya, ketika terjadi inefisiensi anggaran dalam bentuk bantuan dana kesehatan yang meningkat, maka beban anggaran pemerintah juga akan semakin bertambah. Hal ini akan berdampak pada mudahnya akses kesehatan bagi masyarakat.

Menurut penelitian Verhoeven, et.all (2007, pengeluaran pemerintah pada bidang kesehatan tampak pada ketersediaan akses terhadap pelayanan kesehatan. Berdasarkan penelitian ini, tingkat efisiensi bidang kesehatan pada tahun 2004-2012 secara rata-rata masih belum efisien dikarenakan tingkat efisiensi yang mencapai 100% hanya pada tahun 2004, sedangkan tahun 2006-2012 masih dibawah 100%. Penurunan tingkat efisiensi bidang kesehatan mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran yang terjadi tidak dialokasikan untuk memperbaiki aksesibilitas layanan kesehatan, sehingga dapat dikatakan bahwa belum adanya kemampuan dalam penyediaan layanan kesehatan yang murah, karena jangkauan layanan yang masih belum maksimal seperti pada penyediaan layanan imunisasi dan jangkauan pada layanan di puskesmas.

Untuk mewujudkan tingkat kesehatan yang merata, daerah harus mampu menyediakan sarana publik yang memadai untuk urusan kesehatan, seperti fasilitas atau jaminan pelayanan kesehatan karena pengeluaran bidang kesehatan akan mendukung proses akumulasi dalam modal manusia sehingga pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Tingkat Efisiensi Belanja Infrastruktur terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Tingkat efisiensi belanja infrastruktur memiliki pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap IPM dengan nilai probabilitas sebesar 0,4348, artinya tidak terdapat cukup bukti empiris untuk menerima hipotesis "Infrastruktur berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia". Koefisien regresi tingkat efisiensi belanja infrastruktur yang negatif menunjukkan bahwa semakin tidak efisien anggaran infrastruktur akan berdampak pada penurunan IPM, sebaliknya jika semakin efisien anggaran infrastruktur maka akan berdampak pada peningkatan IPM. Hal ini disebabkan karena penggunaan input anggaran dan output bidang infrastruktur yang kurang seimbang, porsi belanja tidak langsung lebih besar daripada belanja langsung dan kondisi jalan yang harus diperbaiki secara berkala mengingat masih terdapat kondisi jalan sedang, rusak ringan maupun rusak berat juga permukaan jalan yang masih beralas tanah serta luas layanan air bersih yang harus ditingkatkan sesuai dengan perbaikan (*potential improvement*) pada bidang infrastruktur.

Ketika terjadi peningkatan efisiensi anggaran bidang infrastruktur, maka akan menyebabkan IPM akan meningkat. Peningkatan pengeluaran infrastruktur berpengaruh terhadap output yang dihasilkan seperti penyediaan dan pemeliharaan jalan yang baik. Sebaliknya, semakin tingginya tingkat inefisiensi anggaran maka IPM akan semakin menurun. Penggunaan anggaran yang berlebihan (inefisien) pada akhirnya merupakan beban yang harus dibayar masyarakat dengan jumlah yang lebih besar. Berdasarkan penelitian ini, tingkat efisiensi bidang infrastruktur pada tahun 2004-2012 secara rata-rata masih belum efisien dikarenakan tingkat efisiensi yang mencapai 100% hanya pada tahun 2004, 2006 dan 2007, sedangkan tahun 2005, 2008-2012 masih dibawah 100%. Penurunan tingkat efisiensi bidang infrastruktur mengindikasikan bahwa peningkatan anggaran yang terjadi tidak dialokasikan untuk peningkatan/perbaikan jalan dan layanan air, sehingga dapat dikatakan bahwa belum adanya kemampuan dalam upaya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas.

Pengeluaran infrastruktur yang lebih mengarah pada pembangunan jalan, jembatan dan penyediaan layanan air pada prosesnya dapat dikelola secara baik oleh pemerintah daerah. Infrastruktur yang baik akan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti pengeluaran infrastruktur seharusnya lebih diarahkan pada peningkatan kualitas daripada menambah panjang jalan. Dengan adanya infrastruktur yang baik, maka proses kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih lancar, sehingga peluang lapangan pekerjaanpun akan semakin besar dan secara tidak langsung akan mengurangi tingkat kemiskinan melalui pengurangan jumlah pengangguran.

### **Kontribusi Teoritis dan Empiris**

1. Hasil penelitian ini memberikan klarifikasi atas kebenaran teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu, seperti Wagner yang mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah juga akan meningkat, terutama karena pemerintah berkewajiban mengatur berbagai hubungan yang timbul dalam masyarakat. Sementara itu, pendapatan perkapita atau PDRB perkapita sebagai salah satu indikator untuk memahami keberhasilan pembangunan ekonomi, menunjukkan bahwa ketika pendapatan perkapita meningkat, maka secara umum PDRB daerah pun akan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja daerah pemerintah Kabupaten Blitar semakin meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan daerah juga sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB perkapita. Hal ini menunjukkan bahwa secara akumulatif dalam meningkatkan kegiatan pembangunan, pemerintah memiliki konsekuensi dalam penggunaan pengeluaran/belanja publik yang lebih besar (meningkat) dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dicerminkan dalam beberapa indikator ekonomi daerah.

2. Belanja daerah dan indikator output penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam kaitannya dengan tingkat efisiensi adalah ketika belanja daerah meningkat secara teori akan berdampak pada peningkatan jumlah output yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, secara rata-rata belanja daerah dalam tiga bidang strategis tersebut meningkat namun tidak diikuti dengan peningkatan jumlah output yang signifikan yang tampak pada nilai/skor efisiensi yang secara rata-rata masih belum efisien. Indikasinya, pengukuran tingkat efisiensi ini tidak sepenuhnya mencerminkan keefisienan dalam penggunaan anggaran dikarenakan selain aspek kuantitas yang terlihat pada jumlah output yang dihasilkan, seharusnya tingkat efisiensi dapat diukur dari aspek kualitas yang tidak tampak dalam bentuk jumlah/angka namun efeknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
3. Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Bidang strategis dalam penelitian ini yaitu pendidikan dan kesehatan adalah cerminan dalam komponen pembentuk IPM, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara peningkatan jumlah anggaran kedua bidang tersebut terhadap peningkatan IPM. Sedangkan infrastruktur tidak berpengaruh secara langsung pada peningkatan IPM. Dalam penelitian ini, pengeluaran pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap variabel IPM, sedangkan pengeluaran infrastruktur berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap variabel IPM.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat terbatas dengan periode waktu yang relatif pendek. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengelaborasi variabel-variabel baru dengan menggunakan data dengan periode penelitian yang lebih panjang.
2. Pengukuran tingkat efisiensi dari sisi output hanya berdasarkan aspek kuantitas yaitu hanya memperhitungkan output yang terukur seperti jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan panjang jalan yang baik, dan tidak mempertimbangkan perhitungan dari aspek kualitas seperti program dan kegiatan yang sifatnya membangun seperti peningkatan mutu pendidik dan standarisasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu diharapkan adanya pengembangan penelitian kedepan dengan model pengukuran yang mempertimbangkan aspek kualitas.

### **Kesimpulan**

1. Pengeluaran sektor publik bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dalam kurun waktu 2004-2012 bervariasi dan cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur) yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah beragam sesuai dengan kebijakan otonomi daerah yang diemban.
2. Selama sembilan tahun penelitian yaitu dari tahun 2004-2012 menghasilkan nilai efisiensi yang bervariasi pada masing-masing bidang, baik pendidikan, kesehatan ataupun infrastruktur secara rata-rata di setiap tahunnya, masih banyak nilai yang belum efisien.
3. Hasil penelitian analisis ini menunjukkan bahwa belanja pendidikan hanya efisien pada tahun 2004 dan 2005. Untuk belanja kesehatan terjadi efisiensi anggaran hanya pada tahun 2004. Sedangkan pada bidang infrastruktur, efisiensi terjadi pada tahun 2004, 2006 dan 2007.
4. Tingkat *potential improvement* di masing-masing bidang di setiap tahunnya mengalami perbedaan pada variabel yang diperbaiki. Tingkat perbaikan dilakukan baik pada sisi input maupun sisi output, disesuaikan pada hasil efisiensi/inefisiensi pada masing-masing bidang di setiap tahunnya.
5. Penurunan tingkat efisiensi pada bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dimungkinkan karena terdapat perbaikan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Hal ini berarti biaya yang dikeluarkan cukup besar, namun jumlah output dari segi kuantitas cenderung tetap.
6. Pengelolaan anggaran belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap indeks pembangunan manusia menunjukkan pengaruh yang bervariasi. Efisiensi pengelolaan belanja pendidikan dan kesehatan menunjukkan pengaruh signifikan dan negatif, sedangkan efisiensi bidang infrastruktur berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap indeks pembangunan manusia.

7. Alokasi anggaran daerah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan insrastruktur menunjukkan kecenderungan yang semakin besar. Mengingat bahwa komponen terbesar belanja daerah masih diperuntukkan pada komponen belanja tidak langsung, khususnya belanja pegawai dibandingkan untuk belanja modal, maka implikasinya adalah bahwa alokasi anggaran daerah masih belum *public oriented* atau aspek *allocative efficiencynya* dapat dikatakan masih relatif rendah.

## Saran

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran belanja publik, diantaranya dengan meningkatkan input dan output yang sama, atau dengan menaikkan output dengan proporsi yang besar dengan kenaikan input yang proporsional, atau juga dengan menurunkan input dengan proporsi lebih besar dan menurunkan output secara proporsional. Sehingga pengelolaan dapat direncanakan sedemikian rupa agar memungkinkan setiap program dapat terlaksana sesuai tujuan.
2. Untuk tahun penelitian yang belum mencapai angka efisiensi, diperhatikan dalam pengalokasian belanja yang lebih tepat berdasarkan *potential improvement* yang telah dipaparkan. Tingkat perbaikan tersebut diharapkan dapat membantu dalam pertimbangan pengalokasian penggunaan input dan output secara seimbang.
3. Dalam pengelolaan anggaran belanja pendidikan, kesehatan dan infrastruktur harus dipertimbangkan tujuan antara dan tujuan akhir yang ingin dicapai pada setiap tahunnya. Hal ini terkait dengan output yang akan dihasilkan nantinya. Pengalokasian input secara tepat akan berpengaruh terhadap output yang akan dihasilkan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
4. Perbaikan dalam meningkatkan efisiensi dapat dilakukan dengan cara memberikan prioritas dan mengoptimalkan pengeluaran terhadap ketiga bidang tersebut dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan indeks pembangunan manusia serta penurunan tingkat kemiskinan. Kebijakan yang dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan wewenang untuk mengalokasikan anggaran dengan lebih cermat, efektif dan efisien sehingga pembangunan ekonomi dapat terealisasikan. Pemerintah daerah diharapkan dapat berupaya sedemikian rupa agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam rangka menggunakan dana untuk pengeluaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
5. Dalam rangka mempersiapkan aparatur daerah yang terampil dalam pengelolaan keuangan daerah, disarankan agar terus meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam aspek pengelolaan anggaran daerah. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pelatihan-pelatihan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
6. Meningkatkan integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengurangi terjadinya tumpang tindih anggaran. Selain itu, pemerintah juga perlu membuat suatu indikator pencapaian dan mekanisme perencanaan yang jelas serta tepat sasaran.
7. Pengukuran tingkat efisiensi ini hanya berdasarkan aspek kuantitas. Hal ini merupakan keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu diharapkan adanya pengembangan penelitian kedepan dengan model pengukuran yang mempertimbangkan aspek kualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar. 2014. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2004-2012. Blitar: BPKAD Kabupaten Blitar
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blitar. 2014. Blitar dalam Angka 2005-2012. Blitar: BPS Kabupaten Blitar
- Bank Dunia. 2007. *Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007*. siteresources.worldbank.org. Diakses tanggal 10 Februari 2014
- Bank Dunia. 2011. *Ringkasan Eksekutif: Analisa Pengeluaran Publik Jawa Timur 2011*. siteresources.worldbank.org. Diakses tanggal 10 Februari 2014
- Budi, Daniel Setyo. 2010. *Efisiensi Relatif Puskesmas-Puskesmas di Kabupaten Pati Tahun 2009*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. www.lontar.ui.ac.id. Diakses tanggal 26 agustus 2013

- Cooper, W.W, Seiford, L.M., & Tone, Kaoru. 2000. Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Application, Reference, and DEA. *Solver Software. USA: Klower Academic Publishers*
- Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 2014. Jumlah Puskesmas, Jumlah, Tenaga Kesehatan dan Jumlah Imunisasi. Blitar: Dinkes Kabupaten Blitar
- Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar. 2014. Jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Jumlah Sekolah. Blitar: Dinkes Kabupaten Blitar
- Farrel, M.J. 1957. The Measurement of Productive Efficiency. *Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General)*, Vol.120, No.3
- Javarof dan Gunnarson. 2008. Government Spending on Health Care and Education in Croatia: Efficiency and Reform Options. *IMF Working Paper WP/08/136*
- Kurnia, Akhmad Syakir. 2006. *Model Pengukuran Kinerja Dan Efisiensi sektor Publik Metode Free Disposable Hull (FDH)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 11 No. 2. journal.uui.ac.id. Diakses tanggal 27 Agustus 2013
- Mangkoesoebroto, Guritno.2010.*Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPF
- Marijn Verhoeven, Victoria Gunnarsson and Stéphane Carcillo. 2007.Education and Health in G7 Countries: Achieving Better Outcomes with Less Spending. *IMF Working Paper WP/07/263*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sipkd.jakarta.go.id. Diakses tanggal 12 Agustus 2013
- Pertiwi, Lela Dina.2007.*Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta. eprints.undip.ac.id. Diakses tanggal 4 September 2013
- Prasetya, Ferry. 2012. *Modul Ekonomi Publik Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah*
- Purwantoro, R.Nugroho dan Erwinta Siswadi. *Pengolahan Data Skala Terbatas dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA): Studi Kasus Efektivitas Proses Peluncuran Produk Baru*. Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia